

DISINTEGRASI SOSIAL: SEBUAH TINJAUAN BUDAYA

*Sjafri Sairin**

Pengantar

Akhir-akhir ini terlihat semacam isyarat yang mengarah kepada kemungkinan akan terjadinya disintegrasi dalam kehidupan bangsa. Isyarat ini semakin kuat denyutnya dalam detak jantung kehidupan politik bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Sejumlah orang Aceh dan Papua secara transparan telah menunjukkan keinginannya untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadikan negara mandiri yang merdeka, padahal dulu mereka sendiri turut mendukung berdirinya negara kesatuan Indonesia itu. Pada awal kemerdekaan dengan mengerahkan segala potensi yang ada padanya, masyarakat Aceh telah menunjukkan dukungan mutlak terhadap kemerdekaan yang diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta, dengan mengumpulkan harta benda rakyat, membeli dan menyerahkan sebuah pesawat terbang yang diberi nama Seulawah menjadi milik negara yang baru merdeka itu. Ini adalah pesawat terbang pertama yang dimiliki negara ini. Begitu pula masyarakat Papua yang memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia pada awal 1960 an. Namun, sekarang mereka seolah-olah merasa kecewa, dan ingin berdiri sebagai negara mandiri, lepas dari induknya, Republik Indonesia.

Sementara itu, berbagai kerusuhan sosial yang terjadi di berbagai belahan bumi Indonesia, baik yang berskala besar seperti kerusuhan sosial di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso (Sulawesi Tengah), maupun yang relatif agak kecil seperti kerusuhan dan pertikaian antardesa di berbagai wilayah Indonesia, juga menunjukkan semakin tebalnya asap api yang mengarah kepada

disintegrasi sosial di tanah air. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Gus Dur, yang diharapkan dapat mengendalikan gejolak sosial yang mengarah kepada disintegrasi sosial itu, ternyata tidak atau belum mampu meredamnya, bahkan di beberapa wilayah Indonesia perselisihan sosial terus-menerus muncul secara sporadis, seperti yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (*Gatra*, 28 Agustus 2000). Seperti gejolak sosial di daerah lainnya, peristiwa terakhir ini juga telah memakan banyak korban jiwa dan harta dan menambah korban yang sudah tidak terhitung jumlahnya akibat peristiwa berdarah di berbagai daerah yang terjadi lebih dulu. Dalam peristiwa itu tampak bahwa orang ingin untuk menarik batas yang tegas antara "kita" (yang satu daerah asal, satu etnis, satu kebudayaan, dan satu sistem kepercayaan) dengan "mereka" (yang berbeda daerah asal, etnis, kebudayaan, dan sistem kepercayaan), dan mencoba mencari berbagai alasan dan argumen untuk menarik garis batas itu. Karena begitu kuatnya upaya untuk mewujudkan gagasan itu, telah menjadikan alasan yang dikemukakan sering terlihat kabur dan tidak jelas, bercampur aduk, dan saling tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Hal seperti inilah yang menyebabkan kesatuan sosial yang telah terbentuk sebelumnya menjadi terganggu dan kalau salah mengambil langkah dalam penyelesaiannya, dapat dipastikan arah kepada disintegrasi sosial akan menjadi kenyataan. Gejala semakin kuatnya upaya menarik batas antara "kita" dan "mereka" terlihat dari kuatnya upaya berbagai kalangan untuk menuntut dibentuknya propinsi dan kabupaten baru, dan usaha ini dalam beberapa kasus sudah berhasil.

* Guru Besar Antropologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

Peristiwa ini telah membawa berbagai implikasi. Beberapa sumber menyebutkan, antara lain, bahwa semakin kuatnya gejala pada daerah-daerah yang baru berdiri ini untuk menarik garis tegas antara "kita" dan "mereka" itu dengan tuntutan agar untuk jabatan-jabatan tertentu harus diisi oleh putra daerah. Umumnya yang dimaksud dengan konsep putra daerah itu adalah mereka yang berasal dan lahir di daerah tersebut. Mereka yang lahir di luar daerah tersebut, meskipun berasal dari daerah itu, tidak termasuk pada konsep putra daerah itu. Anehnya, mereka yang lahir dan tumbuh di daerah itu, tetapi orang tuanya bukan berasal dari daerah itu sendiri, dianggap sebagai bukan putra daerah. Gagasan tentang konsep putra daerah seperti itu menjadi bukti bahwa konsep otonomi daerah telah mengalami proses pemaknaan yang keliru, dan kalau tidak hati-hati akan menjerumuskan bangsa Indonesia pada disintegrasi yang sudah sampai pada tahap menguntirkan itu. Unsur kedaerahan lebih ditonjolkan daripada keutuhan sebagai suatu bangsa.

Sejumlah analisis untuk mencari akar dari masalah kerusakan sosial tersebut telah banyak diulas, baik dari sudut pandangan politik, ekonomi, maupun hukum. Namun, pandangan dari perspektif budaya tampaknya masih belum begitu muncul ke permukaan, padahal dalam beberapa hal akar dari masalah kerusakan dan konflik sosial tersebut tidak dapat dilepaskan dan bahkan boleh dikatakan menyatu dalam kebudayaan. Bukankah kerusakan sosial itu umumnya menyangkut persoalan sara yang sebenarnya melekat dengan nuansa kebudayaan? Tulisan singkat berikut ini mengulas masalah tersebut dan menguraikan mengapa upaya untuk menarik garis batas antara "kita" dan "mereka" menjadi menguat dari sudut pandangan kebudayaan.

Budaya dan Komunitas

Selain unsur kewilayahan dan kesamaan tujuan, terbentuk dan berdirinya sebuah kesatuan sosial sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan topangan dari berbagai unsur yang berbeda yang ada dalam masyarakat itu. Unsur-unsur yang berbeda itulah yang secara fungsional men-

jadi penyangga bagi kukuhnya struktur masyarakat itu. Setiap unsur dan elemen itu seakan-akan menyadari bahwa tanpa perbedaan fungsi kehadiran kesatuan sosial itu akan menjadi goyang. Artinya bahwa perbedaan yang ada di antara komponen masyarakat itu diupayakan menjadi fondasi yang kuat bagi terwujudnya struktur kesatuan sosial itu. Dengan semacam kesepakan itulah pada dasarnya yang menjadikan kesatuan sosial itu menjadi satu struktur sosial itu hadir dan berfungsi sebagaimana adanya dan setiap komponen yang berbeda itu menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya sehingga saling keterikatan dan ketergantungan antara berbagai komponen masyarakat yang berbeda mampu mewujudkan kehadiran masyarakat itu. Oleh karena itu, dalam masyarakat selalu hadir berbagai komponen masyarakat yang berbeda dan kehadiran mereka bahkan diakui secara kelembagaan seperti konsep *Manunggaling Kawula lan Gusti* pada masyarakat Jawa, *Dalihan na Tolu* pada masyarakat Batak Toba, dan *Luhak nan Tigo, Lareh nan Duo* pada masyarakat Minangkabau.

Pada tingkat kesatuan sosial yang paling kecil, seperti keluarga, perbedaan status dan peran tiap-tiap komponen pendukung keluarga juga merupakan keharusan sosial yang tidak dapat dinafikan. Cobalah dibayangkan apakah mungkin sebuah keluarga, yang merupakan bentuk yang paling sederhana dari sebuah kesatuan sosial, dapat hadir jika tidak ditopang oleh adanya sejumlah komponen yang berbeda, yang menopang tegaknya keluarga itu, seperti hadirnya laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, dan kakak dan adik? Pada masyarakat yang lebih luas, katakanlah sebuah desa, apakah ia dapat berdiri tanpa adanya perbedaan di antara elemen yang ada dalam masyarakat tersebut? Begitu pula kehadiran sebuah negara dan bangsa. Para hakim dan penegak hukum tidak akan ada gunanya pada masyarakat yang tidak mengenal kejahatan dan tindak kriminal. Begitu pula, para ulama dan guru tidak perlu hadir jika memang semua anggota masyarakat sudah taat beragama dan sudah pandai dan terampil semuanya. Dapat dipastikan bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak akan ada masyarakat. Jadi, berbeda

itu adalah sesuatu yang mesti ada dan perbedaan itu menjadi syarat mutlak bagi eksistensi suatu kesatuan sosial.

Dalam perjalanannya, sebuah kesatuan sosial juga hanya dapat berkembang, antara lain, karena dipacu oleh berbagai perbedaan yang tumbuh akibat dorongan dari dinamika kehidupan internal dan eksternal masyarakat yang berbeda itu. Dinamika suatu masyarakat dapat dipacu karena adanya pengakuan akan perbedaan itu. Memang tidak dapat dihindari bahwa dalam beberapa hal perbedaan yang muncul itu tentu dapat saja menimbulkan konflik sosial yang akan mengganggu kestabilan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain konflik yang muncul dari perbedaan itu akan menumbuhkan dan mendorong dinamika kehidupan masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Coser, 1956). Oleh karena itu, perbedaan yang ada tidak perlu dihindari, tetapi perlu dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kemajuan masyarakat itu.

Untuk dapat hadir secara dinamis, suatu kesatuan sosial membutuhkan sebuah 'instrument' yang mampu mengikat setiap anggota masyarakat yang berbeda-beda itu dalam sebuah sistem, dan sistem inilah yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Sebagai sebuah sistem, kebudayaan memiliki seperangkat gagasan atau ide yang berpola dan berfungsi sebagai *blue print* bagi sikap dan perilaku manusia yang berbeda-beda dalam masyarakat itu. Dengan sistem gagasan itu manusia dapat hidup bersama di antara sesama warga suatu masyarakat secara dinamis walaupun sebenarnya mereka memiliki berbagai perbedaan.

Indonesia sebagai sebuah komunitas politik dan sosial juga memiliki sebuah gagasan bersama yang berakar dari kesepakatan dari berbagai komponen masyarakat yang berbeda itu, dan gagasan bersama inilah yang mempertautkan warga masyarakat itu menjadi satu kesatuan sosial yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Namun, sebagaimana umumnya sebuah bangunan, bangsa Indonesia juga terdiri dari sejumlah kelompok kesatuan sosial, yang diikat oleh kesamaan etnisitas, sistem kepercayaan, dan kesamaan lainnya. Setiap kesatuan sosial itu memiliki perbedaan dalam meng-

ekspresikan gagasan bersama yang namanya kebudayaan itu dalam kehidupan berbangsa. Berbagai faktor yang menyatu di dalamnya telah menyebabkan sejumlah komunitas yang berbeda-beda itu membangun sendiri gagasan bersamanya yang hanya berlaku untuk kepentingan komunitas itu. Orang Jawa yang merupakan komunitas terbesar di Indonesia memiliki sistem gagasan sendiri yang membedakannya ke kelompok etnik lainnya. Pada tingkat internal, komunitas Jawa sebenarnya memiliki pola gagasan sendiri sehingga menjadikan orang Jawa terpilah dalam beberapa segmen masyarakat Jawa. Masyarakat ini membagi dirinya secara konsentris pada empat komunitas yaitu *negara agung*, *negara*, *mancanagara*, dan *pasisir* (Moertono, 1968). Tiap-tiap komunitas ini memiliki pola gagasan dan budayanya sendiri-sendiri walaupun mereka mengikat diri sebagai komunitas besar yang disebut sebagai orang atau etnis Jawa. Hal yang sama juga pasti terdapat pada suku-bangsa lainnya di Indonesia. Karena itulah, masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat majemuk atau *plural society*, baik secara horizontal maupun vertikal.

Menjelang rubuhnya kekuasaan rezim Orde Baru, kesepakatan pada gagasan bersama itu tampak mengalami gangguan. Kerusuhan sosial dan konflik horizontal terjadi di berbagai tempat. Bangunan struktur sosial yang namanya Indonesia itu tampaknya menjadi goncang dan mengalami semacam dinamika perubahan. Tanda-tanda akan terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat telah menunjukkan wajahnya dalam kehidupan masyarakat sebelum runtuhnya rezim Soeharto. Munculnya kerusuhan antarpendukung pertandingan sepakbola dan terjadinya berbagai demonstrasi yang dilakukan para kaum buruh dan mahasiswa menjadi semacam isyarat akan segera hadirnya sebuah gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Tanpa alasan yang jelas, para pendukung sepakbola melakukan berbagai kerusuhan di banyak kota, tidak peduli apakah tim sepakbola yang didukungnya itu menang atau kalah. Demonstrasi yang digelar kaum buruh dan mahasiswa di berbagai kota menunjukkan kegelisahan sosial yang sedang begelora dalam kehidupan masyarakat.

Keadaan ini memberikan kesan yang kuat bahwa ada semacam keretakan yang menyeret kepada suasana disharmoni dalam kehidupan masyarakat. Gejala sosial itu seakan-akan mengisyaratkan perlawanan yang ditujukan kepada penguasa, sebagai akibat dari sistem politik yang begitu otoriter dan represif pada masa kekuasaan Orde Baru. Gejala sosial ini akhirnya berhasil merubuhkan kekuasaan pemerintahan rezim Orde Baru setelah berkuasa sekitar 32 tahun. Runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru ini tidak mengurangi gejala sosial di Indonesia. Menjadi tanda tanya besar, mengapa gejala dan konflik sosial itu tidak kunjung reda, malahan menjadi semakin membara dan meluas di berbagai kalangan masyarakat. Dari waktu ke waktu terkesan bahwa gejala sosial itu semakin rumit dan kompleks: bercampur aduk antara persoalan etnisitas, agama, ras, kelompok politik, persoalan daerah pusat, antargolongan, dan masalah sosial lainnya. Semuanya mengarah kepada upaya menarik batas antara "kita" dan "mereka". Memang ditengarai bahwa gejala sosial ini jelas erat kaitannya dengan sistem politik yang dianut oleh pemerintahan Orde Baru yang sangat sentralistis, otoriter, represif, dan manipulatif. Pengenalan konsep Penguasa Tunggal adalah salah satu cermin dari sistem politik pemerintahan Orde Baru tersebut.

Pertukaran Sosial yang Tersumbat

Kerusuhan dan konflik sosial yang dapat menjadi benih bagi kemungkinan yang menyeret bangsa ini ke arah disintegrasi seperti yang disaksikan akhir-akhir ini erat kaitannya dengan tidak lancar atau tersumbatnya proses pertukaran sosial (*social exchange*) yang telah terjalin begitu lama di tengah masyarakat yang majemuk ini. Prinsip pertukaran sosial (*social exchange*) yang berlangsung dan berjalan tanpa gangguan yang berarti adalah isyarat yang sangat penting yang menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat relatif berjalan aman dan harmoni (Ekeh, 1974). Pertukaran sosial berupa hubungan yang bersifat resiprokal, baik yang dilakukan secara simetris maupun asimetris, dan redistribusi, yang berlangsung di antara berbagai komponen masyarakat yang berbeda itu, pada haki-

katnya berfungsi sebagai media sosial dalam mewujudkan integrasi dan harmoni dalam masyarakat. Pertukaran sosial itu dapat berwujud pertukaran benda atau pertukaran yang bersifat simbolik sesuai dengan bingkai yang telah ditentukan oleh kebudayaan suatu komunitas.

Di Keraton Yogyakarta, misalnya, pertukaran sosial antara pegawai keraton dengan raja dan para bangsawan lebih bersifat pertukaran simbolik. Para pegawai keraton mengabdikan pada Sultan, bukan mengharapkan pertukaran yang berwujud kebendaan seperti upah atau gaji, tetapi pertukaran yang lebih bersifat simbolik yang tidak dapat diukur dengan alam kebendaan (Selosoemardjan, 1962). Dalam kasus negara, rakyat bersedia membayar pajak kepada pemerintah dengan mengharapkan imbalan berupa jaminan tersedianya fasilitas untuk mendukung kehidupan dan jaminan akan rasa aman bagi mereka. Jika sistem pertukaran seperti ini berjalan seperti yang seharusnya berlangsung, pada dasarnya dapat mengukuhkan integrasi dan harmoni dalam kehidupan masyarakat.

Konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada saat ini berhubungan erat dengan telah terjadinya distorsi dalam proses pertukaran sosial tersebut. Hal ini, antara lain, diisyaratkan dari menurunnya rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam kehidupan masyarakat. Hal ini telah menyeret pula pada menurunnya rasa toleran terhadap perbedaan yang ada (*intolerance of differences*) padahal kedua unsur itu menjadi syarat penting bagi berlangsungnya pertukaran sosial yang dapat menjaga dan mengukuhkan sebuah masyarakat yang harmonis dan integratif.

Sebagai sebuah negara yang berangkat dari komunitas-komunitas etnis yang saling berbeda kebudayaannya, masyarakat Indonesia telah sepakat untuk bersatu dalam suatu bentuk kesatuan politik yang disebut dengan negara. Untuk memelihara kesepakatan itu sejumlah aturan main baik berbentuk undang-undang dan peraturan telah dikeluarkan agar pertukaran sosial tersebut dapat berlangsung secara jujur dan adil sesuai dengan kesepakatan yang telah "ditandatangani". Namun, untuk memelihara kesepakatan itu terjata tidak mudah. Diperlukan sejumlah upaya agar rasa saling per-

caya dan rasa toleran terhadap perbedaan yang ada tidak mengalami distorsi dalam kehidupan masyarakat, apalagi struktur kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi semakin rumit dan kompleks ketika terjadinya persilangan antara mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Namun, kedua komponen yang menjadi dasar utama bagi integrasi sosial itu agak terabaikan selama ini sehingga proses pertukaran sosial menjadi terganggu dan menyeret ke arah kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa.

Macetnya proses pertukaran sosial yang melahirkan konflik sosial yang bertumpang tindih itu tampaknya berkaitan erat dengan semakin rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kemajemukan masyarakat Indonesia pada akhir-akhir ini. Rendahnya persepsi akan hal itu dapat dilihat dari slogan "persatuan dan kesatuan" yang sangat populer dalam bahasa politik Orde Baru lebih dimaknai sebagai keseragaman (*uniformity dan sameness*), bukan *unity* dan *oneness*. Pemaknaan yang keliru itu telah menyebabkan setiap komunitas merasa dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan pemaknaan yang dipolakan itu. Di sini telah terjadi semacam hegemoni pemaknaan dari pemerintah kepada masyarakat, padahal setiap komunitas dan kesatuan sosial yang terdiri dari berbagai suku bangsa ini seharusnya diberikan kesempatan yang luas untuk memberikan kontribusinya guna pengayaan pemaknaan itu sesuai dengan lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan?

Kembali ke Awal

George Foster (1967), seorang ahli antropologi Amerika, pernah mengatakan bahwa sebenarnya setiap komunitas dan kesatuan sosial itu, terutama yang masih diwarnai dengan kehidupan agraris seperti Indonesia, selalu memiliki sebuah sistem gagasan yang disebutnya sebagai gagasan keterbatasan "sumber daya" (*the Image of Limited Good*). Dalam teori ini disebutkan bahwa setiap komunitas selalu mempersepsikan (walaupun sering di luar sadar mereka) bahwa segala sesuatu itu yang ada dalam lingkungan kehidupannya selalu berada dalam keadaan terbatas jumlahnya; baik yang berkaitan dengan sumber daya

alam, kekuasaan, kesempatan, maupun sesuatu yang hadir dalam bentuk simbolik seperti status sosial, misalnya. Kesadaran akan keterbatasan itu menumbuhkan semacam tuntutan dalam diri setiap anggota masyarakat bahwa mereka yang berhasil mendapatkan sumber daya yang terbatas itu secara berlebihan telah mengambil hak orang lain secara berlebihan pula. Karena itu, mereka yang mendapatkan kelebihan itu harus segera mengembalikan dan mendistribusikannya kepada masyarakat karena memang itu adalah milik bersama yang harus dikembalikan. Orang kaya, misalnya, di luar sadar, seolah-olah dituntut untuk mengembalikan sebagian dari kekayaan yang diperolehnya dari sumber daya yang terbatas itu kepada masyarakat dalam bentuk sumbangan materiil maupun moril.

Untuk merealisasikan gagasan itu, masyarakat menciptakan berbagai lembaga atau upacara sebagai media untuk itu, seperti *fiesta* tahunan yang dilaksanakan di beberapa negara Amerika Latin, atau sekaten yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta dan Surakarta, misalnya. Sebaliknya, si kaya pun seolah-olah merasa berkewajiban untuk mengembalikan "barang" atau simbol yang disebutnya itu kepada masyarakat. Di sinilah proses resiprositas dan redistribusi itu berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehingga kehidupan yang harmoni dan integratif merefleksikan dalam kehidupan sosial. Di kalangan masyarakat pedesaan Jawa, hal ini dilakukan dengan penyelenggaraan pementasan kesenian seperti wayang dalam acara tahunan yang disebut bersih desa. Pada kesempatan ini semua lapisan masyarakat bergotong royong untuk memikul biaya penyelenggaraan upacara itu, meskipun biaya itu sebagian besar tetap menjadi tanggungan para orang kaya. Dengan upacara seperti itu, sebenarnya prinsip "keterbatasan sumber daya" itu telah berlangsung dengan lancar.

Kerusuhan dan konflik sosial yang berlangsung di Indonesia saat ini, dalam beberapa hal, sebenarnya erat kaitannya dengan teori Foster itu. Berbagai peristiwa yang terjadi di Sambas, Aceh, Ambon, dan berbagai wilayah lainnya itu berkaitan erat dengan rendahnya pemahaman masyarakat luas terhadap "*the Image of Limited Good*" tersebut. Mereka yang berhasil me-

nuai kelebihan dari keterbatasan itu telah melupakan untuk mengembalikan (sebagian) kepada masyarakat pemilik. Akibatnya, proses resiprositas dan redistribusi menjadi terganggu dalam kehidupan sehingga membawa bibit-bibit konflik sosial yang berkelanjutan. Apalagi arti "keterbatasan" itu dimaknai secara berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, sebagai akibat dari perbedaan kebudayaan masyarakat. Oleh karena itu, konflik sosial yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini menurut hemat saya, antara lain dapat dipecahkan dengan mengaplikasikan teori "gagasan keterbatasan sumber daya" itu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jika ditelusuri berbagai tuntutan yang berkembang di berbagai daerah seperti Aceh, sebenarnya tuntutan itu sangat berkaitan dengan gagasan keterbatasan tersebut. Begitu pula dengan kerusuhan sosial yang terjadi di Ambon dan Sambas. Tampaknya "ada" sesuatu yang dituntut untuk dikembalikan kepada mereka, dan itu lebih bersifat simbolik daripada kebendaan. Tidak ada jalan lain, kembalikanlah sesuatu yang telah diambil secara berlebihan itu, baik itu berupa benda maupun simbol.

Seiring dengan peningkatan kesadaran akan hal itu, patut pula dilakukan upaya yang lebih esensial sifatnya, yaitu menamakan dan menumbuhkan kembali pada diri kita, terutama para pemimpin, untuk meluruskan niat agar lebih mengutamakan kepentingan bersama sebagai bangsa daripada kepentingan kelompok dan golongan. Upaya ke arah itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, apalagi sampai saat ini sikap dan perilaku elite bangsa masih kurang perhatian terhadap hal itu. Covey (1999) mengatakan bahwa untuk membangun suatu komunitas diperlukan masyarakat yang mempunyai keinginan kuat untuk mewujudkan atau mengembalikan *one heart and one mind* pada semua komponen bangsa, dan hal ini sebenarnya pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tanpa itu rasanya akan terjadi kesukaran untuk mewujudkan komunitas ideal yang dicita-citakan. Selain itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat dijadikan landasan bagi berlangsungnya pertukaran sosial secara terbuka.

Selain melaksanakan hukum secara adil dan berwibawa, baik secara vertikal maupun horizontal, perlu pula diperhatikan strategi untuk mengembalikan kredibilitas para pemimpin yang sudah terpuruk akhir-akhir ini di mata banyak kalangan masyarakat. Hal itu hanya dapat dilakukan jika saja apa yang diucapkan oleh para elite politik dapat dijadikan pegangan. Selama ini sering para pemimpin mengucapkan berbagai janji manis dalam berbagai kesempatan, tetapi janji yang pernah diucapkan itu sering dilupakan. Oleh karena itu, segala janji yang pernah dilontarkan, bagaimanapun sederhananya bentuk janji itu, harus segera diupayakan untuk dilunasi. Dengan demikian, saling percaya (*mutual trust*) yang agak terpuruk akhir-akhir ini dalam denyut jantung kehidupan masyarakat akan dapat segera dipulihkan. Pertukaran sosial yang berlangsung secara harmonis hanya dapat diwujudkan apabila *mutual trust* sudah dapat kembali mengisi kehidupan bangsa. Dengan demikian, garis batas yang sempit diukir dalam kehidupan komunitas untuk membedakan antara "kita" dan "mereka" sudah dapat diurai kembali untuk kemudian diikuti dengan meningkatnya saling percaya (*mutual trust*) dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga pertukaran sosial yang merupakan tali pengikat kehidupan yang memperkuat integratif sosial dapat ditingkatkan dengan lebih intensif.

Penutup

Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia memang tidak sederhana, terutama menyangkut upaya penyelesaian berbagai bentuk konflik sosial yang semakin muncul ke permukaan. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meredam konflik sosial itu tampaknya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Berbagai kendala tampaknya menghalangi upaya penyelesaian konflik sosial tersebut. Sejumlah kendala itu tampaknya berkaitan erat dengan menurunnya kewibawaan kepemimpinan lokal, sebagai akibat dari penerapan sistem administrasi pemerintahan desa yang bercorak seragam untuk seluruh Indonesia. Sistem administrasi pemerintahan desa yang demikian itu telah menjadikan kepemimpinan lokal menjadi tidak tumbuh dengan baik dan

akibatnya tidak ada di antara mereka yang dapat secara berwibawa mewakili masyarakatnya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Upaya pemerintah untuk menyelesaikan kasus konflik sosial di Maluku dan Aceh, misalnya, terlihat kurang berhasil. Ini terutama disebabkan tidak adanya lagi pemimpin lokal yang dapat mewakili aspirasi masyarakat dalam penyelesaian konflik itu. Jeda kemanusiaan yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan kelompok GAM menjadi tidak begitu mangkus untuk meredakan konflik di Aceh karena sejumlah masyarakat merasa tidak diwakili oleh GAM. Bandingkanlah hal itu dengan penyelesaian peristiwa DI/TII di Aceh pada masa lalu. Begitu pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan dengan almarhum Tengku M. Daud Beureu'eh, kerusuhan di propinsi ujung barat Indonesia itu segera berhenti. Untuk mengembalikan kewibawaan pemimpin lokal itu tentu tidak mudah. Namun, dengan upaya serius yang disertai oleh penerapan strategi yang tepat, tujuan itu suatu waktu pasti akan tercapai. Mungkin dengan berlangsungnya proses desentralisasi arah untuk membangkitkan "batang terendam" itu akan menjadi kenyataan, yang pada gilirannya tentu akan mereduksi kemungkinan berlanjutnya konflik sosial yang menjurus pada disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. London: Free Press of Glencoe.
- Covey, Stephen R. 1999. "The Ideal Community", dalam Frances Hesselbein et. al. (Eds.) *The Community of the Future*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, hlm. 49-59.
- Ekeh, Peter. 1974. *Social Exchange Theory*. London: Heinemann.
- Foster, George M. 1967. "Peasant Society and the Image of Limited Good" dalam Jack M.Potter, May N. Diaz dan George M.Foster (eds.) *Peasant Society: A Reader*. Boston: Little Brown and Company.
- Moertono, Soemarsaid. 1968. *State and Statecraft in Old Java*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University.
- Selosoemardjan. 1962. *Social Changes in Jogjakarta*. Ithaca: Cornell University Press.